

Dampak korupsi sebagai penghambat ekonomi dan investasi di Indonesia

Maya Abidatun Maghfiroh

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: mayabidatun@gmail.com

Kata Kunci:

Korupsi, dampak ekonomi, iklim investasi, investasi, pertumbuhan ekonomi

Keywords:

Corruption, economic impact, investment climate, investment, economic growth

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang melumpuhkan struktur ekonomi dan menghambat arus modal secara masif. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme korupsi sebagai rintangan struktural dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta iklim investasi yang kondusif. Melalui metode deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, ditemukan bahwa korupsi berfungsi sebagai "pajak terselubung" yang memicu ekonomi biaya tinggi. Praktik ini merusak keadilan kompetisi pasar, mendistorsi alokasi sumber daya publik, dan mengikis kepercayaan investor asing (Foreign Direct Investment). Lebih lanjut, ketidakpastian hukum akibat suap birokrasi

memperlemah daya saing nasional dan memicu inefisiensi pada infrastruktur strategis. Kajian ini menyimpulkan bahwa penguatan integritas institusi, supremasi hukum, dan akselerasi digitalisasi melalui e-government adalah prasyarat mutlak untuk meniadakan hambatan investasi. Tanpa reformasi kelembagaan radikal, Indonesia berisiko terjebak dalam middle-income trap. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi pilar utama dalam strategi transformasi ekonomi nasional jangka panjang guna menjamin stabilitas dan daya saing global.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia has become a systemic problem that cripples the economic structure and significantly impedes capital flows. This study aims to analyze the mechanisms of corruption as a structural obstacle to achieving sustainable economic growth and a conducive investment climate. Using a qualitative descriptive method based on literature, it was found that corruption functions as a "hidden tax" that fuels a high-cost economy. This practice undermines fair market competition, distorts the allocation of public resources, and erodes foreign direct investment confidence. Furthermore, legal uncertainty resulting from bureaucratic bribery weakens national competitiveness and triggers inefficiencies in strategic infrastructure. This study concludes that strengthening institutional integrity, the rule of law, and accelerating digitalization through e-government are essential prerequisites for eliminating investment barriers. Without radical institutional reform, Indonesia risks falling into the middle-income trap. Therefore, eradicating corruption must be a key pillar of a long-term national economic transformation strategy to ensure stability and global competitiveness.

Pendahuluan

Korupsi adalah sebuah fenomena yang rumit dan menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, tetapi juga berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi. Di Indonesia, isu korupsi telah lama



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mempengaruhi berbagai sektor, dan dampaknya terasa di banyak lapisan masyarakat. Dalam hal ini, korupsi dapat dipandang sebagai penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan iklim investasi yang sehat. Salah satu dampak paling jelas dari korupsi adalah menurunnya kepercayaan investor. Dalam dunia investasi, kepercayaan adalah faktor kunci yang memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal. Ketika korupsi merajalela, baik investor domestik maupun asing menjadi ragu untuk berinvestasi, mengingat risiko tinggi dan biaya tambahan yang mungkin timbul akibat praktik tidak etis. Akibatnya, aliran investasi menurun, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi negara.

Korupsi tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan ekonomi yang tidak transparan dan tidak adil, sehingga menurunkan kepercayaan investor terhadap sektor-sektor yang rentan terhadap praktik koruptif (Indrawan & Adityo, 2024). Kondisi ini menyebabkan sektor strategis seperti infrastruktur dan teknologi yang seharusnya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi justru mengalami hambatan, sehingga berdampak pada rendahnya inovasi dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Selain itu, dampak korupsi juga meluas pada penurunan kualitas layanan publik, karena adanya penyalahgunaan anggaran yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Akibatnya, ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan layanan yang optimal dapat memicu ketidakpuasan masyarakat serta berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik secara lebih luas.

Upaya pemberantasan korupsi merupakan langkah strategis dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Penerapan kebijakan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang tegas menjadi faktor penting dalam menekan praktik korupsi di berbagai sektor (Irawati et al., 2025). Lingkungan yang lebih terbuka dan bersih dari praktik koruptif diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor, sehingga mendorong masuknya investasi yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami keterkaitan antara korupsi, iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi, guna merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berdaya saing.

Pembahasan

Dampak Korupsi terhadap Iklim Investasi

Korupsi merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi kualitas iklim investasi di Indonesia, karena praktik tersebut menciptakan lingkungan usaha yang tidak transparan dan penuh ketidakpastian (Kusumadyahdewi & Yasri, 2022). Tingginya tingkat korupsi meningkatkan persepsi risiko di kalangan investor, sehingga mendorong mereka untuk mengalihkan investasi ke negara yang memiliki tata kelola pemerintahan lebih baik dan tingkat korupsi yang lebih rendah. Selain itu, praktik korupsi seperti suap dalam proses perizinan turut melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan birokrasi, sehingga investor merasa kurang memiliki jaminan atas keamanan modal yang ditanamkan. Kondisi ini juga memicu terjadinya *high cost economy*, di mana pelaku usaha

harus menanggung biaya tambahan di luar ketentuan resmi, yang pada akhirnya menurunkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi di tingkat global (Siregar et al., 2025).

Korupsi turut menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kegiatan investasi. Proses perizinan yang seharusnya berjalan cepat dan efisien seringkali menjadi lambat akibat praktik korupsi, sehingga menghambat masuknya investasi baru. Situasi ini membuat investor harus menghadapi berbagai hambatan administratif yang tidak efisien dan berbelit-belit. Selain itu, korupsi juga mengurangi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menarik investasi. Berbagai program reformasi yang dirancang untuk memperbaiki iklim investasi seringkali tidak berjalan optimal karena adanya penyimpangan dalam implementasinya. Akibatnya, upaya pemerintah dalam meningkatkan daya Tarik investasi menjadi kurang efektif (Rachman et al., 2025).

Dampak Korupsi terhadap Investasi

Korupsi memberikan dampak langsung terhadap penurunan tingkat investasi, khususnya investasi asing langsung (FDI). Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi umumnya kurang menarik bagi investor karena dianggap memiliki risiko besar dan sistem yang tidak transparan. Akibatnya, aliran modal yang seharusnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi berkurang. Di sisi lain, investasi domestik juga terdampak oleh praktik korupsi. Pelaku usaha dalam negeri sering menghadapi proses birokrasi yang kompleks dan tidak efisien, yang pada akhirnya meningkatkan biaya usaha. Kondisi ini membuat pelaku usaha enggan untuk melakukan ekspansi maupun investasi baru, sehingga pertumbuhan sektor swasta menjadi terhambat. Selain itu, korupsi juga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Perusahaan yang memiliki kedekatan dengan praktik korupsi cenderung memperoleh keuntungan lebih dibandingkan perusahaan yang menjalankan usaha secara jujur. Hal ini menyebabkan distorsi pasar dan menurunkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan (Emirzal et al., 2023).

Korupsi juga memengaruhi keputusan investor dalam menentukan lokasi investasi. Investor cenderung memilih wilayah yang memiliki tingkat transparansi tinggi serta sistem birokrasi yang efisien. Sebaliknya, wilayah dengan tingkat korupsi tinggi akan dihindari karena dianggap memiliki risiko yang lebih besar. Selain itu, praktik korupsi dapat menghambat pertumbuhan investasi jangka panjang. Ketidakpastian yang ditimbulkan membuat investor enggan menanamkan modal dalam jangka waktu lama. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pengembangan sektor industri yang membutuhkan investasi besar dan berkelanjutan (Sidabutar et al., 2025).

Dampak Ekonomi Korupsi

Korupsi menimbulkan berbagai dampak ekonomi yang merugikan, salah satunya adalah ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sering dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga pelaksanaan program pembangunan menjadi tidak optimal. Selain itu, korupsi juga menyebabkan ketidaktepatan dalam alokasi sumber daya. Keputusan ekonomi seringkali tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat,

melainkan pada kepentingan tertentu. Akibatnya, sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak memperoleh alokasi yang memadai, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang. Korupsi juga berkontribusi terhadap meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Ketidakefektifan pembangunan menyebabkan terbatasnya lapangan kerja dan tidak meratanya distribusi kesejahteraan. Dampak ini pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi (Pratama, 2025).

Korupsi juga berdampak pada menurunnya kualitas pembangunan infrastruktur. Proyek yang terindikasi korupsi seringkali tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga hasil pembangunan menjadi kurang optimal. Hal ini menyebabkan rendahnya efisiensi dalam mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, korupsi turut menghambat perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan atau program pemerintah akibat praktik korupsi. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan dalam pengembangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan kecil (Budi et al., 2025).

Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Korupsi memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, di mana tingkat korupsi yang tinggi cenderung menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan oleh menurunnya efisiensi ekonomi, berkurangnya investasi, serta meningkatnya biaya produksi. Akibatnya, aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, korupsi juga berdampak pada penurunan kualitas pembangunan. Proyek-proyek yang terindikasi korupsi sering kali tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga tidak memberikan manfaat optimal bagi perekonomian. Dampak ini terlihat pada rendahnya kualitas infrastruktur dan layanan publik. Dalam jangka panjang, korupsi melemahkan institusi dan tata kelola pemerintahan. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat dan investor, serta menghambat terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Tyas, 2024).

Korupsi juga berpengaruh terhadap penurunan produktivitas tenaga kerja (Irawati et al., 2025). Ketika sistem ekonomi tidak berjalan secara efisien akibat praktik korupsi, maka kesempatan kerja menjadi terbatas dan pengembangan kualitas tenaga kerja terhambat. Hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi menghambat terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif. Distribusi hasil pembangunan menjadi tidak merata akibat adanya penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara menyeluruh (Hartati, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Tingginya tingkat korupsi menyebabkan lingkungan bisnis menjadi kurang transparan, penuh ketidakpastian, serta memiliki tingkat risiko yang tinggi bagi investor. Kondisi ini berdampak pada

menurunnya kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga minat investasi menjadi rendah.

Selain itu, korupsi juga berpengaruh langsung terhadap memburuknya kualitas iklim investasi. Praktik suap, birokrasi yang tidak efisien, serta lemahnya kepastian hukum mendorong munculnya fenomena high cost economy. Hal ini menyebabkan Indonesia kurang mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi di tingkat global.

Dari perspektif ekonomi, korupsi menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran negara serta penyimpangan dalam alokasi sumber daya. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sering disalahgunakan, sehingga menghambat perkembangan sektor-sektor produktif. Dampaknya tidak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan ketimpangan sosial dan angka kemiskinan.

Dalam jangka panjang, korupsi melemahkan kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan. Kondisi ini menghambat terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan hambatan besar bagi kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara tegas dan berkelanjutan dalam upaya pemberantasan korupsi. Langkah ini harus diiringi dengan penguatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik. Dengan adanya sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, kepercayaan investor terhadap sistem hukum di Indonesia diharapkan dapat meningkat.

Di samping itu, reformasi birokrasi perlu terus diperkuat guna menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, dan bebas dari praktik korupsi. Penerapan digitalisasi dalam layanan pemerintahan dapat menjadi solusi efektif untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi memicu praktik suap maupun pungutan liar.

Pemerintah juga perlu mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang konsisten, jelas, dan mendukung kegiatan investasi. Penyederhanaan regulasi serta peningkatan kepastian hukum akan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi investor dalam menanamkan modal di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Budi, A. S., Lejab, Y. N. B., Rohi, W. G., & Dima, E. T. Y. (2025). Dampak Korupsi terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1183–1188.
- Emirzal, E., Gultom, Y. M. L., Adrison, V., & Brata, R. A. (2023). The correlation between state capture, grand corruption, petty corruption, and investment in Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 157–170.

- Hartati, Y. S. (2021). Analisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79–92.
- Indrawan, I., & Adityo, R. D. A. R. D. (2024). Reformasi Hukum dan Pembuktian Kasus Korupsi Gratifikasi Di Indonesia. Deepublish Publisher. <https://repository.uin-malang.ac.id/22516/>
- Irawati, W., Sulistiani, D., Sari, D. W., Rohmiatun, E. T., Ginting, R., Setiawan, R. Y., & Widiyati, D. (2025). Penanaman Nilai Anti Korupsi dalam Menghadapi Dunia Kerja. Penerbit Lakeisha, Klaten. <https://repository.uin-malang.ac.id/25693/>
- Kusumadyahdewi, K., & Yasri, H. L. (2022). Literasi Investasi. Cerdas Ulet Kreatif. <https://repository.uin-malang.ac.id/11928/>
- Pratama, I. P. A. K. (2025). Dampak Korupsi terhadap Sistem Ekonomi dan Sosial di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(2), 51–54. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v3i2.1174>
- Rachman, S. N., Polontoh, H. M., Harefa, J. E., Harefa, A., & Yuliana, T. (2025). Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Sidabutar, A. Y., Yusup, M. H., Victoria, R., Tantri, R., Azzahra, S. P., & Astawa, I. K. (2025). Konsistensi dan Kepastian Kebijakan Investasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8. A), 14–26.
- Siregar, F. A., Fitria, N., & Yulis, S. (2025). Pengaruh Korupsi terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 829–841. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.858>
- Tyas, I. A. (2024). Dampak Kejahatan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Sebuah Kajian Literatur. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 819–831.